

LKPJ


TAHUN 2024



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA DUMAI**

BerAKHLAK  **# bangga
melayani
bangsa**

CONTACT US

 0765-440476

 bapenda@dumaikota.go.id

 bapenda.dumaikota.go.id

LKPJ BAPENDA KOTA DUMAI TAHUN 2024

A. URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan berdasarkan kondisi tahun awal 2024, kecenderungan perkembangan di masa lalu dan kemampuan keuangan daerah. Guna dapat mewujudkan kinerja pembangunan daerah yang terukur, maka target kinerja yang ditetapkan diupayakan semaksimal mungkin dalam bentuk kuantitatif, kecuali untuk aspek-aspek yang ternyata sangat sulit dikuantifikasikan seperti agama dan budaya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 dan pertimbangan tersebut diatas, lebih lanjut Tabel 1 memberikan rincian penetapan semua indikator dan target kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai untuk periode 2022-2026 untuk Urusan Keuangan sebagai berikut :

Tabel 1
Target Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2022-2026

Bidang Urusan : KEUANGAN							
INDIKATOR	SATUAN	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	30	31	32	33	34	34
Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	51	52	53	54	54	54

Berdasarkan data pada Tabel 1, maka capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai untuk setiap Indikator Kinerja di Bidang Urusan Keuangan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Target dan Realisasi Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
1.	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	32	35,30
2.	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	53	66,15

Sumber data : Badan Pendapatan Daerah

Penjelasan atas Target dan Realisasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 pada Tabel 2 diatas adalah sebagai berikut :

1. Target Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 pada Indikator “Persentase PAD terhadap Pendapatan” (Indikator Tujuan) adalah sebesar 32 %, dengan realisasi sebesar 35.30 % atau persentase capaian kinerja sebesar 110,31%.
2. Target Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 pada Indikator “Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)” adalah sebesar 53 %, dengan realisasi sebesar 66,15 % atau persentase capaian kinerja sebesar 124,81 %.

Pengukuran capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai untuk setiap indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3
Pengukuran dan Capaian Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Target Akhir Renstra (%)	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
1.	Persentase PAD terhadap Pendapatan	32	35,30	110,31	34	103,82
2.	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Pajak Daerah (PAD)	53	66,15	124,81	54	122,50

Capaian target dan realisasi kinerja OPD ini ditopang oleh Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Sub Kegiatan pendukung antara lain :

- 1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- 2) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
- 3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- 4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- 5) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- 6) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- 7) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 8) Penetapan Wajib Pajak Daerah
- 9) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- 10) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- 11) Penagihan Pajak Daerah
- 12) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- 13) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- 14) Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah
- 15) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Adapun kegiatan di atas merupakan indikator keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai.

Langkah yang perlu diambil guna meningkatkan pencapaian sasaran outcome di masa yang akan datang adalah:

- a. Optimalisasi Sumber Daya Manusia untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan cara mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. Upaya meningkatkan potensi daerah yang terbatas, dengan cara :
 - 1) Mengadakan pengkajian dan penelitian yang ada kaitannya dengan potensi Pendapatan Daerah;

- 2) Mengintensifkan Potensi daerah yang ada, melalui :
 - Penggalian potensi Pendapatan Daerah yang dimungkinkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pendapatan Daerah;
 - Penyesuaian sistem pengelolaan anggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan pola peningkatan kerjasama Pemerintah, swasta dan masyarakat.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan pelayanan internal dan eksternal dengan penetapan sistem pelayanan minimal.
- c. Melakukan konsultasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan Pendapatan Daerah. Meskipun dana untuk mengikutsertakan pegawai pada kegiatan khusus belum tersedia, namun aktivitas dan kegiatan lain yang ada kaitannya dengan Pendapatan Daerah seperti konsultasi atau rapat/pertemuan dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi/Wilayah serta antar Kabupaten/Kota, masih dapat diikuti sesuai dengan kondisi yang ada dan memanfaatkan sumber dana yang tersedia;
 - d. Melakukan perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya dengan melihat kembali hasil kinerja tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024 alokasi Pagu Anggaran Belanja untuk Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai khususnya Belanja Operasi adalah sebesar **Rp. 54.859.264.036** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 1.086.281.559** dari total anggaran Belanja Daerah tersebut sebesar **Rp 55.945.545.595** dialokasikan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja.

Untuk melaksanakan program utama, pada tahun 2024 dianggarkan sebesar **Rp. 6.104.851.487** dengan realisasi serapan anggaran sebesar **Rp. 3.897.007.523** atau **63,83 %**.

Adapun realisasi kegiatan dari pelaksanaan Program Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah :

Tabel 4
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Anggaran Belanja Bapenda Kota Dumai Tahun 2024 per 31 Desember 2024

URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN		TARGET FISIK	REALISASI FISIK	SATUAN TARGET DAN REALISASI FISIK	CAPAIAN KINERJA FISIK (%)	TARGET KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA KEUANGAN (%)
I	Belanja Operasi					54.859.264.036	36.473.101.072	66,48
II	Belanja Modal					1.086.281.559	509.483.344	46,90
III	Belanja Tidak Terduga					-	-	-
IV	Belanja Transfer					-	-	-
Jumlah					99,69	55.945.545.595	36.982.584.416	66,10
1	PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	100	%	100	49.840.694.108	33.085.576.893	66,38
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	15	Dokumen	100	198.927.300	151.684.496	76,25
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	Dokumen	100	29.479.500	27.241.550	92,41
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	Dokumen	100	24.855.250	21.739.752	87,47
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	Dokumen	100	28.094.000	19.366.248	68,93
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2	2	Dokumen	100	37.164.800	28.096.510	75,60
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2	2	Dokumen	100	29.596.050	22.863.386	77,25
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	Laporan	100	34.933.500	26.417.200	75,62
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	Laporan	100	14.804.200	5.959.850	40,26
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	3	Dokumen	100	41.582.929.964	27.040.505.822	65,03
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	74	74	Orang/bulan	100	41.537.995.964	27.009.695.312	65,02
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	2	2	Laporan	100	29.934.000	25.637.210	85,65
	3 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	Dokumen	100	15.000.000	5.173.300	34,49

3	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		2	2	Laporan	100	49.608.800	45.317.900	91,35
	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	Laporan	100	49.608.800	45.317.900	91,35
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		3	3	Laporan	100	1.549.440.000	1.094.021.500	70,61
	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	2	Unit	50	96.000.000	25.200.000	26,25
	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	74	74	Paket	100	199.000.000	157.500.000	79,15
	3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	74	74	Orang	97,30	1.254.440.000	911.321.500	72,65
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		154	154	Dokumen	100	1.718.140.394	1.491.711.100	86,82
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1	Paket	100	60.000.000	14.075.310	23,46
	2	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2	2	Paket	100	350.000.000	290.843.009	83,10
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	3	Paket	100	216.500.000	179.430.000	82,88
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2	2	Paket	100	200.000.000	131.538.500	65,77
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4	4	Dokumen	100	24.000.000	17.640.000	73,50
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	150	Laporan	100	867.640.394	858.184.281	98,91
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		27	27	Unit	85	644.563.800	440.439.244	68,33
	1	Pengadaan Mebel	10	10	Unit	100	263.095.300	198.749.994	75,54
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16	16	Unit	87,50	281.468.500	232.410.000	82,57
	3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	Unit	100	100.000.000	9.279.250	9,28
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		11	11	Laporan	100	2.845.408.350	2.170.490.239	76,28
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2	Laporan	100	10.000.000	10.000.000	100,00
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	4	Laporan	100	450.000.000	264.746.844	58,83
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	Laporan	100	137.163.000	80.637.495	58,79
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4	4	Laporan	100	2.248.245.350	1.815.105.900	80,73
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		167	167	Unit	98,80	1.251.675.500	651.406.592	52,04

	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9	9	Unit	100	344.792.000	251.178.472	72,85
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	156	156	Unit	98,72	160.000.000	91.187.027	56,99
	3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	Unit	100	346.883.500	13.535.000	3,90
	4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	Unit	100	400.000.000	295.506.093	73,88
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		100	100	%	100	6.104.851.487	3.897.007.523	63,83
	1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100	100	%	100	6.104.851.487	3.897.007.523	63,83
	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	1	1	Dokumen	100	86.935.780	51.237.787	58,94
	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	1	1	Dokumen	100	131.762.860	90.721.868	68,85
	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1	1	Laporan	100	1.062.384.682	260.638.983	24,53
	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1	1	Unit	100	1.196.813.859	437.266.431	36,54
	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	10	10	Laporan	100	334.178.700	289.525.821	86,64
	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	1	Laporan	100	667.168.806	478.095.500	71,66
	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10	10	Obyek Pajak	100	382.986.400	357.686.843	93,39
	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	10	10	Dokumen	100	253.603.000	217.114.502	85,61
	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1000	1000	Layanan	100	495.443.000	449.327.618	90,69
	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1	1	Dokumen	100	114.999.200	97.642.320	84,91
	11	Penagihan Pajak Daerah	1	1	Dokumen	100	385.115.000	260.039.896	67,52
	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1	1	Dokumen	100	121.091.500	119.412.940	98,61
	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	4	4	Dokumen	100	220.000.000	196.515.172	89,33
	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1	1	Laporan	100	298.539.000	272.877.003	91,40
	14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4	4	Laporan	100	353.829.700	318.904.839	90,13

Adapun penjelasan atas capaian realisasi kegiatan dari pelaksanaan Program Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah dengan indikator keluaran kegiatan tersebut adalah Jumlah Dokumen rencana pengelolaan pajak daerah dengan target 1 Dokumen , dengan realisasi sebesar 58,94 %, dan pencapaian target kinerja sebesar 100% Dengan hasil tercapainya jumlah dokumen pengelolaan pajak daerah.

2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.

Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah dengan indikator keluaran dari kegiatan yaitu : jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebesar 68,85 %, dan pencapaian target kinerja sebesar 100% dengan tercapainya 1 dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah.

3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah . Dengan indikator keluaran kegiatan yaitu : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah sebanyak 1 Laporan dengan realisasi sebesar 24,53 % dan pencapaian target kinerja 100 % dengan tercapainya 1 Laporan Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.

4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Dengan Indikator keluaran dari kegiatan tersebut yaitu : Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dengan target kinerja sebanyak 1 Unit dan terealisasi 36,54 % .

5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah . Indikator keluaran

dari kegiatan tersebut yaitu : jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah sebanyak 10 Laporan dengan realisasi sebesar 86,64 % dengan tercapainya 10 Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah.

6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Dengan Indikator keluaran dari kegiatan tersebut yaitu : jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah sebanyak 1 Laporan dengan realisasi sebesar 71,66 % dengan tercapainya 1 Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah.

7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Indikator Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu : Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya sebanyak 10 Objek Pajak dengan realisasi sebesar 93,39 % dengan tercapainya 10 objek pajak yang disesuaikan NJOP nya.

8. Penetapan Wajib Pajak Daerah

Indikator Keluaran dari kegiatan tersebut adalah : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah sebanyak 10 Dokumen dengan realisasi sebesar 85,61 % dengan tercapainya 10 dokumen Ketetapan Pajak Daerah.

9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Indikator Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu : jumlah layanan dan konsultasi Pajak Daerah sebanyak 2000 layanan dengan realisasi sebesar 90.69 % dengan tercapainya 2000 layanan dan konsultasi Pajak Daerah.

10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Indikator Keluaran dari kegiatan tersebut adalah: Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan

Verifikasi sebanyak 1 Dokumen dengan realisasi sebesar 84.91 % dengan tercapainya 1 Dokumen Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi.

11. Penagihan Pajak Daerah

Indikator Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu : Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah sebanyak 1 Dokumen dengan realisasi sebesar 67.52 % dengan tercapainya 1 Dokumen hasil pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah.

12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Indikator Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu : Jumlah Dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah sebanyak 1 dokumen dengan realisasi sebesar 98.61 % dengan tercapainya 1 dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah.

13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Indikator Keluaran dari kegiatan yaitu : Jumlah Dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah sebanyak 1 Dokumen dengan realisasi sebesar 89.33 % dengan tercapainya 1 Dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah.

14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Indikator Keluaran dari kegiatan yaitu : Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah sebanyak 1 laporan dengan realisasi sebesar 91.40 % dengan tercapainya 1 laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah.

15. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran dari kegiatan yaitu : Jumlah laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sebanyak 4 Laporan dengan realisasi sebesar 90.13 % dengan

tercapainya 4 laporan hasil Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

B. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KOTA DUMAI TERHADAP LKPJ WALIKOTA TAHUN 2023

Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Walikota adalah proses yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan Laporan Kerja Pemerintah Daerah (LKPJ) yang dibuat oleh Walikota. Dalam proses ini, DPRD akan melakukan analisis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam LKPJ, serta melakukan verifikasi atas laporan keuangan yang disajikan oleh Walikota. Setelah melakukan evaluasi dan verifikasi, DPRD akan memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk perbaikan atau tindak lanjut yang perlu dilakukan. Adapun catatan DPRD terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam LKPJ Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Rekomendasi DPRD Tahun 2023

1. Bapenda sebagai Leading Sector dalam Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah agar dapat mendorong dan mengkoordinir seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan inventarisir sumber-sumber pendapatan daerah sehingga PAD dapat dimaksimalkan hasilnya dan berkontribusi besar dalam APBD Kota Dumai
2. Diharapkan target pendapatan Kota Dumai dapat ditingkatkan, sehingga akan berdampak signifikan terhadap APBD Kota Dumai

2. Tindak Lanjut 2023

Terkait rekomendasi DPRD mengenai optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan target pendapatan Kota Dumai, Bapenda berkomitmen untuk mengambil peran strategis sebagai leading sector dalam proses ini. Kami akan

mengoordinasikan seluruh perangkat daerah untuk melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap potensi pendapatan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Langkah-langkah yang telah diambil oleh Bapenda meliputi:

a. Pemetaan dan Telaah Sumber-Sumber Pendapatan

Mengidentifikasi potensi pajak daerah, dan retribusi lainnya yang dapat dimaksimalkan.

b. Digitalisasi dan Transparansi Sistem Pendapatan

Implementasi sistem berbasis teknologi untuk meningkatkan akurasi pemungutan dan meminimalkan kebocoran pendapatan.

c. Peningkatan Target Pendapatan

Penetapan target pendapatan yang lebih progresif, berbasis data empiris, untuk mendukung peningkatan APBD yang signifikan.

Kami yakin dengan kolaborasi yang terintegrasi antara perangkat daerah, masyarakat, dan sektor swasta, target pendapatan yang lebih tinggi dapat tercapai, sehingga berkontribusi positif terhadap pembangunan Kota Dumai yang berkelanjutan.

3. Tujuan/Masalah yang Diselesaikan

a. Masalah terkait kurangnya pendataan sumber pendapatan daerah telah diselesaikan melalui pembentukan tim lintas perangkat daerah. Tim ini berhasil mengidentifikasi aset-aset strategis dan potensi pajak/retribusi yang sebelumnya belum terdata secara optimal.

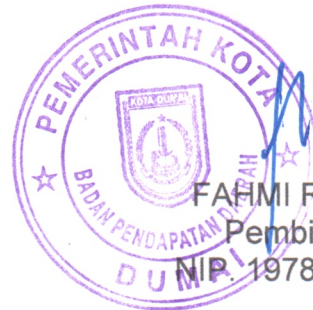
b. Bapenda telah menyelesaikan pengadaan dan penerapan sistem digital berbasis teknologi untuk memantau, mencatat, dan mengelola pendapatan daerah secara transparan (aplikasi MATAHAR1). Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pemungutan, tetapi juga memastikan akurasi data, meminimalkan potensi kebocoran, serta meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Ke depan, Bapenda berkomitmen untuk memastikan semua sumber pendapatan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan menetapkan target yang lebih progresif, berbasis data dan potensi ekonomi lokal, sehingga memberikan dampak signifikan pada APBD Kota Dumai.

Kota Dumai, 07 Januari 2025

KEPALA,



FAHMI RIZAL, S.STP,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19780710 199711 1 001